

**PENGARUH BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2016-2020)**

SKRIPSI

Oleh :

SETYANI AGUNG DWI ASTUTI

NIM. G01217021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Setyani Agung Dwi Astuti

Nim : G01217021

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2016-2020)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2022

Menyatakan,

A rectangular stamp with a textured background. It features a handwritten signature in black ink that reads 'Setyani Agung Dwi Astuti'. The signature is written over some faint, illegible text and numbers on the stamp.

Setyani Agung Dwi Astuti

G01217021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Pengaruh Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2016-2020)” yang ditulis oleh Setyani Agung Dwi Astuti NIM. G01217021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Agustus 2022

Pembimbing,



Abdullah Kafabih, M.SE

NIP. 199108072019031006

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016-2020)

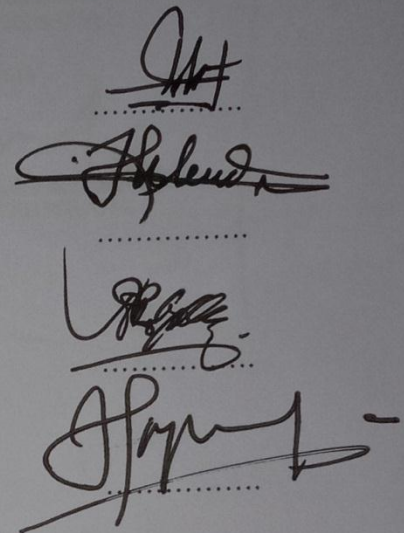
oleh
Setyani Agung Dwi Astuti
NIM: G01217021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 09 Agustus 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Abdullah Kafabih, M.SE
NIP. 199108072019031006
(Penguji 1)
2. Dr. H. Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003
(Penguji 2)
3. Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311
(Penguji 3)
4. Hapsari Wiji Utami, M.SE
NIP. 198603082019032012
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 18 Agustus 2022

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Setyani Agung Dwi Astuti
NIM : G01217021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : setyaniagung@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGARUH BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA

TIMUR TAHUN 2016-2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Januari 2023

Penulis

(Setyani Agung Dwi Astuti)

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yaitu mengalokasikan anggaran belanja, karena pengeluaran belanja pemerintah penghubung urusan publik. Pengalokasikan anggaran harus memperhatikan kemampuan anggaran keuangannya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat berdampak secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan ekonometrika yaitu menggunakan analisis regresi dengan data panel. Sampel yang digunakan pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (uji t), dengan nilai probabilitas $> 0,05$, sehingga variabel belanja hibah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia yaitu belanja hibah (X_1) = 0.5049, sedangkan belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia yaitu (X_2) = 0.9331.

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian anggaran yang dapat berdampak berjangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Indeks Pembangunan Manusia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Waktu dan Tempat Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
D. Definisi Operasional.....	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Data dan Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	39
B. Analisis Data	42
BAB V PEMBAHASAN	
A. Pembahasan Hasil Penelitian	51
BAB VI KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggunaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Kab/Kota Jawa Timur 2016.....	19
Tabel 2.2 Komponen Angka Harapan Hidup di Kab/Kota Jawa Timur 2016-2018.....	22
Tabel 2.3 Komponen Pendidikan di Kab/Kota Jawa Timur 2016-2018.....	23
Tabel 2.4 Komponen Pengeluaran Perkapita di Kab/Kota Jawa Timur 2016-2017	24
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Jawa Timur 2016-2020.....	40
Tabel 4.2 Belanja Hibah Berdasarkan Kab/Kota Jawa Timur 2017-2018.....	41
Tabel 4.3 Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Kab/Kota Jawa Timur 2017-2018.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Common Effect.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Random Effect.....	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow.....	46
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman Test	46
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieratis	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4.12 Hasil Uji T.....	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Determinasi.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penyelenggaraan pembangunan beralihnya wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Dengan pemerintah daerah yang akan dijadikan sentral pembangunan diharapkan dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Pada pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Harapan dari pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001 hingga saat ini bukan hanya pelimpahan wewenang kekuasaan, tetapi terciptanya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Desentralisasi merupakan beralihnya kewenangan dari lingkungan pusat (*Central Government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*Local Government*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing berdasarkan kondisi riil yang terjadi.¹ Otonomi daerah bukan sekedar pelimpahan wewenang akan tetapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada otonomi daerah perlu disadari bahwa transformasi paradigma dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk

¹ Windhu Putra, “*Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*”, Depok : PT Raja Grafindo Persada , 2019, hlm 215.

Untuk mengelola keuangannya, perekonomian secara mandiri dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berkembangnya otonomi daerah setiap tahunnya, melalui transfer dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Maka untuk menyusun anggaran belanja diharapkan dapat mendanai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Pada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pengalokasian anggaran belanja hibah maupun belanja bantuan sosial yang lebih besar salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Indeks pembangunan manusia salah satu untuk mengukur berhasil tidaknya suatu pembangunan manusia di setiap daerah yaitu umur panjang, masyarakatnya memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, memiliki kehidupan yang layak, pendidikan secara merata. Namun dapat dilihat dari tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat meningkat relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tercapainya suatu pembangunan daerah pemerintah dapat menyediakan sarana penunjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui terlibatnya masyarakat pada proses pembangunan, sehingga pembangunan manusia dapat secara merata dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Aspek penting dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia yaitu mengolokasikan anggaran belanja, karena pengeluaran belanja pemerintah salah

satu penghubung urusan publik dengan pembangunan manusia. Diharapkan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat meratakan pembangunan sesuai kebijakan daerah untuk mengembangkan wilayah berdasarkan potensi masing-masing.² Pada desentralisasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk lebih bijak mengalokasikan dana anggarannya.³

Adanya kewenangan daerah mengelola alokasi anggarannya melalui potensi wilayahnya, serta meningkatkan fasilitas prasarana yang memadai. Dalam mengelola keuangan daerah harus sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Pelimpahan kewenangan secara penuh kepada daerah agar dapat mengalokasikan anggaran dan menggunakannya sesuai kebutuhan dan karakteristik pada daerah masing-masing.

Pada pemberian belanja daerah, masing-masing daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan anggarannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Selain harus memperhatikan kondisi anggaran pemberian hibah juga harus memperhatikan kondisi anggaran, namun tidak hanya kondisi anggaran yang diperhatikan tetapi akses terhadap sarana dan prasarana. Apabila memiliki akses sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bantuan sosial ini diberikan agar

² Ibid, 219.

³ Zul Putra S, dkk, “ Analisis Belanja Pemerintah Terhadap indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Luwu”, *Riset UNIBOS Makassar*, Vol. 3 No. 003, (2017), hlm 52.

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya, membantu perekonomian masyarakat yang memiliki pendapatan yang masih rendah.

Dengan adanya bantuan yang diberikan diharapkan bisa membantu masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan taraf hidup masyarakat yang meningkatkan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pada bantuan sosial dan hibah tidak terus menerus berkelanjutan untuk memberikan bantuannya, melainkan pemerintah harus melihat masyarakat mana yang berhak menerimanya agar tepat sasaran. Meskipun alokasi anggarannya ditetapkan secara transparan, pada pelaksanaannya tetap menjadikan celah untuk penyelewengan.

Namun, ironisnya adanya pemberian otonomi daerah dan dikeluarkannya kebijakan atau peraturan, tidak secara otomatis menjadi baik. Dalam hal ini tidak menjamin permasalahan yang terjadi akan teratasi sehingga harus diikuti dengan serangkaian perubahan publik. Perubahan publik yaitu mengubah format lembaga untuk dapat memperbaharui proses kegiatan atau program secara transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas aparatur.⁴ Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

⁴ Dadang Suwanda, Burdan Ali Junjuna, Azhar Affandi, Ellen Rusliati, *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2019, hlm 1.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah belanja hibah berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada periode 2016-2020?
2. Apakah belanja bantuan sosial berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada periode 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh hibah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Untuk menganalisis pengaruh bantuan sosial secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk ilmu pengetahuan, diharapkan menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh belanja hibah, bantuan sosial pada IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam melakukan analisis yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan terkait pengaruh belanja hibah, bantuan sosial pada IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini akan menjadi masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Setyono anggaran daerah yaitu suatu rencana keuangan daerah selama satu tahun tentang pengeluaran, sumber pendapatan. Secara konsep, anggaran merupakan dokumen perencanaan yang telah disetujui pemerintah daerah, DPRD dalam bidang keuangan. Dalam perencanaan keuangan daerah dikatakan baik apabila anggarannya dapat memenuhi aspirasi masyarakat.⁵

➤ Fungsi anggaran daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, fungsi anggaran daerah (APBD) yang mengenai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi. Fungsi ini berdasarkan sudut pandang administrasi negara, terdapat tiga fungsi utama yaitu :

1. Perencanaan (Pembuatan Kebijakan)

Dalam fungsi anggaran digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk satu periode akan datang. Adapun tugas utama perencanaan yaitu :

- a. Pengalokasian potensi sumber ekonomi daerah.
- b. Proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

⁵ Rispa Ngindana, Imam Hanafi, “*APBD Partisipatif*”, Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012, hlm 38.

2. Pengawasan Keuangan

Fungsi ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur legalitas, keadilan untuk seluruh kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan anggaran keuangan daerah untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Tugas-tugas dalam fungsi pengawasan :

- a. menerbitkan laporan keuangan pertanggung jawaban kepala daerah.
- b. melakukan pengawasan di tingkat perencanaan strategis, pengendalian tugas rutin, pengendalian manajemen terhadap individu di dalam organisasi.

➤ **Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus memperhatikan prinsip kebijakan berikut :

1. Partisipasi masyarakat

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Pada penyusunan anggaran keuangan daerah harus bisa memberikan informasi secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber

pendanaan disetiap jenis belanja, serta besaran anggaran dengan manfaat, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang ditetapkan.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Menurut Burkhead dan Winer mendefinisikan bahwa anggaran pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun akan datang yang dihubungkan melalui perencanaan pemerintah terhadap pengeluaran, penerimaan untuk kepentingan negara. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pedoman penerimaan, pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan negara untuk meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat.⁶

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa mempunyai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi. Sebagai berikut :

- a. Fungsi otorisasi merupakan anggaran negara menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang telah ditetapkan.
- b. Fungsi perencanaan yaitu anggaran negara yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan anggaran. Apabila pembelanjaan telah direncanakan, maka pemerintah negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan yang telah rencanakan sebelumnya. Misalnya, pemerintah telah merencanakan dan menganggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan

⁶ Yuni Andono Achmad, “Modul Memahami APBN Dan APBD”, 2021, <https://staffgunadarma.ac.id/> diakses tanggal 11 Agustus 2022.

dengan nilai miliaran. Maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar dapat berjalan lancar.

c. Fungsi pengawasan yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan akan mudah untuk seluruh masyarakat menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan anggaran dana negara untuk keperluan tertentu apakah telah benar atau tidak.

d. Fungsi distribusi merupakan suatu kebijakan anggaran negara yang harus memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan.

e. Fungsi stabilisasi yaitu suatu anggaran pemerintah yang menjadi pedoman untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

f. Fungsi alokasi yaitu bahwa suatu anggaran negara harus dianggarkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu instrument pada kebijakan fiskal yang telah mempengaruhi suatu perekonomian dan keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh pelaku pasar. Pada hal ini disebabkan APBN secara umum telah menjelaskan rencana kerja dan kebijakan yang akan diputuskan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber ekonomi yang dimiliki, alokasi pendapatan dan kekayaan.⁷

⁷ Mulyawan, Wawan, Alia, Widia, “APBN Dan Pendapatan Nasional”, 2020, 10.

3. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah yang wajib dianggarkan setiap tahun anggaran serta penyajiannya telah dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, jenis. Dalam penggunaannya belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan untuk penanganan dibidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat serta daerah. Untuk urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik.⁸ Belanja daerah menurut jenisnya ada dua yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja yang dianggarkan tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

a. Belanja pegawai yaitu belanja yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berupa gaji, tunjangan telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan pada pegawai negeri sipil daerah melalui keputusan yang objektif sesuai kemampuan

⁸ Moch Khusaini, “*Keuangan Daerah*”, Malang : UB Press, 2018, hlm 164.

keuangan daerah serta telah disetujui DPRD sesuai perundang-undangan, meningkatkan kesejahteraan pegawai.

b. Belanja bagi hasil merupakan suatu anggaran dana bagi hasil bersumber dari pendapatan provinsi atau pendapatan kabupaten/kota. Belanja ini meliputi :

1. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Belanja bantuan keuangan desa.
3. Belanja bantuan kepada daerah lain.

c. Belanja tidak terduga yaitu belanja yang sifatnya tidak diharapkan akan diberikan terus menerus seperti bencana alam.

d. Belanja bunga alokasi anggarannya untuk pembayaran utang yang dilakukan atas kewajiban pemerintah, seperti bunga utang obligasi, utang bunga pinjaman.

e. Belanja subsidi berupa belanja tidak langsung digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan tertentu agar harga jual dapat terjangkau untuk masyarakat.

2. Belanja Langsung

Belanja yang dipengaruhi langsung adanya pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Belanja daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan daerahnya, jika pendapatan daerah meningkat maka daerah mampu

dan mandiri membiayai daerahnya. Pada pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik maupun non fisik harus disesuaikan dengan anggaran serta prioritas yang direncanakan. Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari :

1. Belanja layanan publik yaitu pengeluaran yang ditujukan meningkatkan fasilitas publik kepada masyarakat seperti akses surat perizinan, akses informasi, belanja peralatan perkantoran sehari-hari, pembayaran gaji.
2. Belanja ekonomi yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, menciptakan lapangan pekerjaan, pengeluaran ini bertujuan agar berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Belanja kesehatan yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan seperti pembelian obat, fasilitas kesehatan, gedung.
4. Belanja pendidikan merupakan pengeluaran yang digunakan meningkatkan kualitas pendidikan seperti fasilitas gedung, buku, fasilitas jaringan internet, fasilitas prasarana dan sarana kegiatan belajar.
5. Belanja ketertiban dan keamanan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan daerah.
6. Belanja pariwisata dan lingkungan hidup yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk peningkatan hiburan bagi masyarakat melalui promosi, menjaga tempat wisata serta mempertahankan kelestarian alam atau cagar budaya dan menciptakan kenyamanan lingkungan hidup bagi masyarakat.

7. Belanja perlindungan atau jaminan sosial merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti permasalahan sosial dan lingkungan, bencana alam.

A. Penggunaan Belanja Daerah

Belanja daerah dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan dilakukan pada bagian bidang tertentu yang pelaksanaannya antara pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

4. Belanja Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/05/2011 tentang sistem akuntansi hibah, bahwa belanja hibah adalah setiap pengeluaran pusat dalam bentuk uang, barang, yang diberikan kepada pemerintah daerah secara tidak terus menerus. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, masyarakat. Pada ketentuan umum pemberian hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yaitu pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat.

Hibah berarti pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

⁹ Rosmery Elyse, "Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah", Bandung : ALQaPrint Jatinangor, 2020, hlm 7.

Perdata) hibah terkait antara keuangan daerah, sesuai pada hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :¹⁰

a. Pasal 1666 KUHP Perdata, bahwa hibah merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang menghibahkan pada waktu ia masih hidup, secara sukarela dan tidak dapat diambil kembali, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah.

b. Pasal 27 ayat (7) huruf ff PP Nomor 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa anggaran hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang atau barang kepada pemerintah atau daerah lain, perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan penggunaannya, bersifat tidak wajib, tidak terus menerus.

c. Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang kepada masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan.

d. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada

¹⁰ Saparudin, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014*, (Skripsi Universitas Terbuka Jakarta, 2016), hlm 58.

anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah diubah pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengertian hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

e. Buletin Teknis Nomor 4 standar akuntansi pemerintahan (SAP) tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah, menyatakan bahwa hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang atau barang kepada pemerintah, perusahaan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta secara spesifik telah ditetapkan, tidak terus menerus, tidak wajib.

f. Buletin Teknis Nomor 13 standar akuntansi pemerintah tentang akuntansi hibah menyatakan bahwa belanja hibah diberikan kepada pemerintah negara, organisasi internasional, pemerintah pusat atau daerah, kelompok masyarakat, organisasi secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak terus menerus kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

a. Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan pemerintah serta tetap

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta sesuai asas pengelolaan keuangan daerah.¹¹

Belanja hibah dapat dialokasikan kepada :

a. Pemerintah

Hibah diberikan kepada pemerintah pada satuan pekerja dari kementerian atau lembaga non kementerian yang berada di wilayah daerahnya.

b. Perusahaan Daerah

Pada bantuan hibah ini perusahaan daerah memberikan hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan berkelanjutan bantuan hibah yang diterima daerah dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Masyarakat

Dalam bantuan hibah diberikan kepada masyarakat yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi tertentu, kesehatan, bantuan pendidikan, keagamaan, kesenian, keolahragaan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 bahwa bantuan sosial bentuk anggaran pemberiannya berupa uang atau barang kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, secara

¹¹ Ibid, hlm 60.

selektif dan memiliki kejelasan diperuntukan penggunaannya. Pada ketentuan umum dalam pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi : a. Individu, keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil disebabkan oleh krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, serta bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Belanja ini meliputi :

a. Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan.

b. Belanja bantuan sosial partai politik.

Belanja bantuan sosial terdiri dari dua jenis belanja yaitu bantuan sosial yang direncanakan dan belanja bantuan yang tidak direncanakan. Belanja bantuan sosial yang direncanakan merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai kriteria untuk mendapatkan bantuan. Untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan merupakan anggaran digunakan ketika terjadi bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pasca bencana alam.

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban, melindungi, memulihkan kondisi kehidupan mental, ekonomi, serta memberdayakan yang dimiliki masyarakat yang sedang mengalami kerentanan sosial agar kehidupannya menjadi lebih baik dan sejahtera. Bantuan sosial pada anggarannya bisa dari pemerintah pusat maupun daerah yang alokasi dananya dari

anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada bantuan sosial yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat mengalokasi anggarannya sesuai kemampuan keuangan daerahnya. Kriteria belanja bantuan sosial harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Dalam pemberian bantuan sosial harus selektif untuk masyarakat yang berhak menerimanya.
- b. Telah memenuhi syarat penerima bantuan sosial seperti identitas nama, tempat berdomisili pada wilayah administratif daerahnya.
- c. Tidak terus menerus, kecuali pada kondisi tertentu dapat berkelanjutan atau pemberian bantuan sosial setiap tahun anggaran sampai yang menerima bantuan sosial kehidupannya membaik dari resiko sosial.
- d. Telah sesuai pada tujuan dalam pemberian bantuan sosial untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan masyarakat agar bisa memiliki kehidupan yang layak.

Tabel 2.1 Penggunaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Menurut Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur 2016

	Bantuan Pangan	Sanitasi Rumah
Kabupaten	2016	2016
Pacitan	72,03%	65,01%
Ponorogo	69,91%	77,41%
Kota Kediri	41,12%	93,78%
Kota Blitar	24,52%	94,09%

Sumber : Badan Pusat Statistik *Jatim.go.id*

Pada tabel 2.1 diatas mengenai bantuan sosial pada Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 72,03%, bantuan pangan Kota Kediri dan Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 41,12% Kota Kediri, untuk Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 24,52%. Sedangkan untuk bantuan sanitasi rumah Kabupaten Pacitan sebesar 65,01% jika dilihat pada setiap Kabupaten maupun Kota bantuan sanitasi mengalami peningkatan di Kota Blitar sebesar 94,09%.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development*), pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk. Fokus dalam pembangunan sesungguhnya adalah penduduk atau manusia itu sendiri karena penduduk merupakan kekayaan nyata suatu bangsa. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu daerah. Dalam suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dengan pendapatan domestik bruto tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakat.

United Nations Development Program (UNDP) telah menyusun indikator kesejahteraan manusia melalui meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan, kehidupan yang layak. *Human Development Index* (HDI) adalah salah satu perangkat yang bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan.¹² Pada *Human*

¹² Ibid, hlm 5.

Development Index dapat dipahami, dianalisis berdasarkan segi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini dasar pemikiran konsep pembangunan manusia : ¹³

- a. Memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan. Apabila kualitas sumber daya manusia meningkat maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.
- b. Memberikan seluruh masyarakat untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan memiliki kehidupan yang layak, pekerjaan, tidak hanya pada aspek ekonomi. Serta memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat agar bisa mengakses sumber daya ekonomi.
- c. Tidak hanya memfokuskan untuk peningkatan taraf hidupnya, namun bisa mudah mengakses fasilitas kesehatan. Adanya kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk mengakses kesehatan serta fasilitas yang memadai sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan pembangunan manusia.
- d. Meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat melalui pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat, maka menciptakan kualitas manusia, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam *Development Human Indeks* (HDI) yang diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk setiap daerah.

¹³ Yulia Sarah Manurung, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Selatan”, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm 17.

Yang dimaksud dengan : 1) usia hidup dan sehat yaitu bisa memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk mengaksesnya harapan hidup, 2) melek huruf yaitu kemampuan untuk membaca dan tulisan, 3) pendidikan yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, 4) standar hidup menuju pada kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dapat diketahui tingkat indeks pembangunan manusia yang diukur dari komponen IPM di suatu wilayah, berikut ini komponen IPM :¹⁴

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) diwaktu lahir yaitu rata-rata perkiraan lama hidup seseorang, untuk dapat mengindeksnya melalui masyarakat bisa hidup sehat serta bisa mengakses fasilitas kesehatan. Apabila fasilitas kesehatan yang memadai, maka seorang bisa memiliki angka harapan hidup lama. berikut tabel komponen angka harapan hidup di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur :

Tabel 2.2 Komponen Angka Harapan Hidup Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2016-2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (%)			Indeks Kesehatan (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pacitan	71.18	71.31	71.52	0,79	0,79	0,79
Ponorogo	72.18	72.27	72.43	0,80	0,80	0,81
Kota Kediri	73.65	73.69	73.80	0,83	0,83	0,83
Kota Blitar	73.09	73.17	73.36	0,82	0,82	0,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Jatim.go.id

¹⁴ Yufika Furi Larassita, "Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jember Periode 1990-2014". (Skripsi – Universitas Jember , 2016) , Hal 13.

Jika dilihat pada tabel 2.2 pada angka harapan hidup di Kabupaten Pacitan setiap tahunnya mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 71.18% dan tahun 2017 sebesar 71.31%, tahun 2018 sebesar 71.52%. di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sebesar 72.18%, di tahun 2017 sebesar 72.27% dan tahun 2018 sebesar 72.43%. Sedangkan di Kota Kediri tahun 2016 sebesar 73.65% dan Kota Blitar mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2016 sebesar 73.09%. Sedangkan indeks kesehatan setiap tahunnya di Kabupaten, Kota tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

2. Pendidikan

Pendidikan salah satu faktor penting untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Untuk mempertimbangkan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempermudah seluruh masyarakat untuk bisa memperoleh pendidikan melalui fasilitas yang memadai, tidak hanya fasilitas yang memadai namun kualitas tenaga kerjanya. Berikut tabel komponen angka pendidikan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur :

Tabel 2.3 Komponen Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2016-2018

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (%)			Harapan Lama Sekolah (%)			Indeks Pendidikan (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pacitan	6.89	7.02	7.19	12.19	12.41	12.61	0,57	0,58	0,59
Ponorogo	6.97	7.01	7.17	13.69	13.70	12.71	0,61	0,61	0,62
Kota Kediri	9.89	9.90	9.91	14.61	14.95	14.96	0,74	0,75	0,75
Kota Blitar	9.88	9.89	9.90	14.00	14.01	14.02	0,72	0,72	0,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Jatim.go.id

Pada tabel 2.3 rata-rata sekolah di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya di Kabupaten Pacitan tahun 2017 sebesar 7.02% dan tahun 2018 sebesar 7.19%, sedangkan Kota Kediri tahun 2017 sebesar 9.90% lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pacitan. Sedangkan harapan lama sekolah untuk Kabupaten Pacitan dan Ponorogo mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 12.61% di Kabupaten Pacitan, sedangkan Kabupaten Ponorogo di tahun 2018 sebesar 12.71%. sedangkan indeks pendidikan di Kabupaten/Kota kenaikannya tidak terlalu tinggi.

3. Hidup Layak

Kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dari pengeluaran perkapita. Dan biasanya diukur dari pendapatan perorang dan dapat diukur dari ketersediaan barang, hiburan, keamanan, kehidupan sosial, sumber budaya, kesehatan. Untuk menghitungnya harus dimulai dengan menghitung *Purchasing Power Parity* (Paritas Daya Beli). Konsep teori paritas daya beli didasarkan pada hukum satu harga, yang menyatakan bahwa harga komoditas yang sama di dua wilayah yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata harga komoditas barang dan jasa.

**Tabel 2.4 Komponen Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur 2016-2017**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)		Indeks Daya Beli (%)	
	2016	2017	2016	2017
Pacitan	8048	8288	0,64	0,64
Kota Kediri	11070	11550	0,73	0,75

Sumber : Badan Pusat Statistik.go.id

Pada tabel 2.4 untuk pengeluaran perkapita di Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 8048 juta mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar 8288 juta. Sedangkan untuk indeks daya beli Kabupaten Pacitan tahun 2016, di tahun 2017 sebesar 0,64% tetap sama tidak mengalami kenaikan. Dibandingkan Kabupaten Pacitan pada Kota Kediri pengeluaran perkapita mengalami peningkatan sebesar 11070 juta di tahun 2016, tahun 2017 sebesar 11550 juta, sedangkan indeks daya beli sebesar 0,73% tahun 2016, tahun 2017 sebesar 0,75%.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

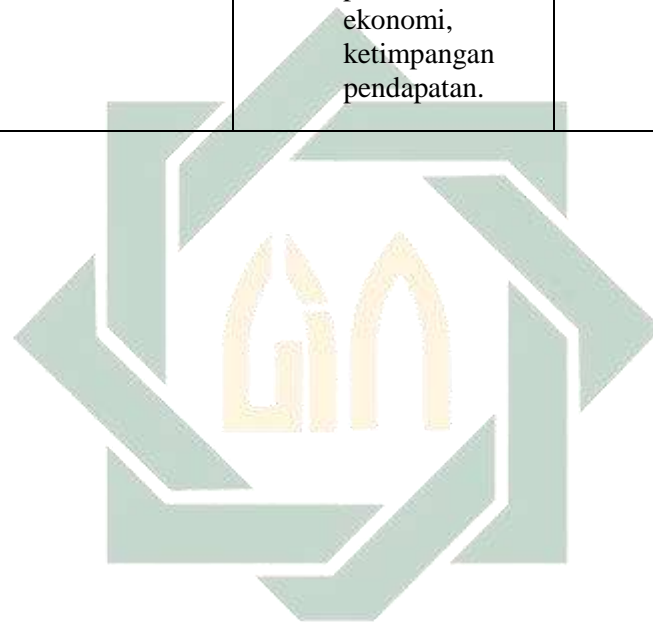
No	Judul Penelitian dan Pengarang	Metode Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Judul : Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Tingkat Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2010-2014 Pengarang : Dita Marwati Tahun : 2016	1. Model analisisnya menggunakan regresi berganda. 2. Variabel : IPM, tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat belanja modal.	Dari hasil analisis menunjukkan secara simultan dan parsial tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, dan tingkat belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	Penelitian terdahulu lokasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampel sejumlah 21 Kab/Kota, periode penelitian 2010-2014. Sedangkan penelitian saat ini memiliki dua variabel belanja dan lokasi penelitian terbaru di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur
2	Judul : Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan	1. Penelitian ini dalam analisis datanya menggunakan <i>Fixed Effect</i>	Hasil dari menganalisis bahwa belanja pemerintah memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan	Penelitian terdahulumemiliki tiga variable bebas, sedangkan penelitian saat ini memiliki dua variabel belanja . Penelitian

	<p>Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Pengarang : Hadi Sasana</p> <p>Tahun : 2012</p>	<p><i>Model</i>(FEM).</p> <p>2. Variabel : indeks pembangunan manusia, belanja pemerintah daerah, pendapatan perkapita.</p>	<p>manusia di Kab/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>pendapatan perkapita belum pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kab/Kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>terdahulu daerah yang diteliti di kab/kota Jawa Tengah, sedangkan penelitian saat ini di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.</p>
3	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Pengarang : Luh Dini Ya Sintha Dwiandari & I Dewa Nyoman Badera</p> <p>Tahun : 2018</p>	<p>1. Metode penelitian non probabilitas dan teknik sampling jenuh. analisisnya regresi linier berganda.</p> <p>2. Variabel : pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, IPM, rasio kemandirian.</p>	<p>menunjukkan bahwa kebijakan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap belanja dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki efek terhadap indeks pembangunan manusia.</p>	<p>Penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di Bali, sedangkan penelitian saat ini di Kabupaten/Kota Jawa Timur.</p>
4	<p>Judul :</p> <p>Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Dan Belanja Bantuan Sosial</p>	<p>1. Metode sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.</p> <p>2. Variabel dependen : belanja pegawai,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan status daerah masing-masing berpengaruh signifikan terhadap biaya pegawai. IPM dan status masing-masing daerah tidak signifikan untuk barang pengeluaran, rasio</p>	<p>Penelitian terdahulu memiliki lebih dari 3 variabel X, sedangkan penelitian saat ini variabel X yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial. daerah yang diteliti dalam penelitian terdahulu di Kab/Kota di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian</p>

	<p>(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012)</p> <p>Pengarang : Ardyan Firdaus Mustoffa</p> <p>Tahun : 2016</p>	<p>modal, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial.</p> <p>3. Variabel independen : ukuran dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, <i>Human Development Indeks (HDI)</i>.</p>	<p>kemandirian.</p>	<p>saat ini di Kabupaten /Kota Jawa Timur.</p>
5	<p>Judul :</p> <p>Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012</p> <p>Pengarang : Miftahul Jannah</p> <p>Tahun : 2013</p>	<p>1. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif</p> <p>2. Variabel : hibah, bantuan sosial, APBD.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan hibah dan bantuan sosial telah optimal dengan kebijakan pemerintah.</p>	<p>Penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di daerah Kabupaten Kubu, sedangkan penelitian saat ini di Kabupaten/Kota Jawa Timur.</p>

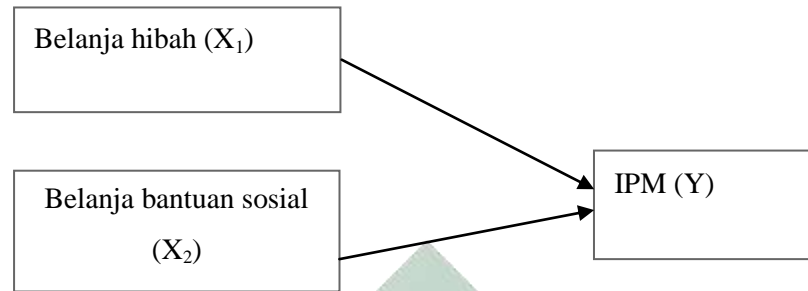
6	<p>Judul :</p> <p>Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)</p> <p>Pengarang : Anugrah Priambodo</p> <p>Tahun : 2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisisnya menggunakan Fixed Effect Model. 2. Variabel : indeks pembangunan manusia, kesejahteraan, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, belanja pegawai 	<p>Hasil menunjukkan bahwa belanja modal, pertumbuhan ekonomi, belanja pegawai . belanja daerah memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.</p>	<p>Penelitian terdahulu memiliki empat variabel yaitu belanja modal, belanja daerah, belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian saat ini menggunakan dua variabel belanja .</p>
7	<p>Judul :</p> <p>Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado</p> <p>Pengarang : Agustien Sendouw & Vekie Adolf Rimate & Debby Ch. Rotinsulu</p> <p>Tahun : 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan regresi berganda. 2. Variabel : belanja hibah, belanja sosial, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. 	<p>Hasil Dari penelitian ini belanja sosial, belanja modal , pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memiliki tiga variable bebas, daerah penelitian di Kota Manado, sedangkan penelitian saat ini lokasinya di Kabupaten/Kota Jawa Timur.</p>

8.	<p>Judul :</p> <p>Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Barat</p> <p>Pengarang : Yohana Pranita & Idris</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>Model penelitian ini menggunakan model persamaan simultan (<i>simultaneous equation regression model</i>). Metode penelitian ini menggunakan metode <i>Indirect Least Square (ILS)</i>.</p> <p>1. Variabel : belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan.</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan secara simultan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p>	<p>Penelitian saat ini lokasi penelitiannya di kabupaten/kota Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu tempat. Sedangkan penelitian terdahulu bertempat di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.</p>
----	---	---	--	---



C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Pada gambar 2.1. diatas dapat dilihat kerangka konseptual bahwa ada dua variabel penelitian yang mempengaruhi IPM yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial. Hibah, bantuan sosial merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan membiayai kebutuhan pengeluaran daerah. Adanya belanja hibah, belanja bantuan sosial diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian terdahulu alokasi anggaran belanja daerah masih belum merata dan masih menitikberatkan alokasi anggaran bidang lain, sehingga penulis tertarik untuk menguji antar variabel dengan data sampel yakni pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2020.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan di dalam penelitian yang keberadaannya masih lemah, dan perlu diuji secara empiris, dikatakan sementara karena jawaban masih berdasarkan pada teori, yang didukung dengan data-data yang ada. Berdasarkan dari permasalahan yang ada, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka disusunlah hipotesis berikut ini :

1. Ho : Diduga belanja hibah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020.
H1 : Diduga belanja hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2020.
2. Ho : Diduga belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2020.
H2 : Diduga belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan pendekatan model ekonometrika. Ekonometrika suatu cara pandangan mengenai bagaimana peran dalam ilmu ekonomi serta mengaplikasikannya melalui matematika statistik, data ekonomi digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang empiris.¹⁵ Memiliki tujuan untuk digunakan sebagai alat menganalisis suatu peristiwa ekonomi yang aktual berdasarkan pada perkembangan yang terjadi secara keseluruhan melalui teori dan observasi yang memiliki hubungan dalam pengampilan kesimpulan yang tepat.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Indonesia dengan *time series* dan *cross section* bertempat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur rentan waktu dalam penelitian ini tahun 2016-2020.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh

¹⁵ Agus Tri Basuki, “*Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*”, Yogyakarta : Katalog Dalam Terbitan, 2020, hlm 1.

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹⁶ Sampel bagian kecil dari populasi yang dapat mewakili populasi. Populasi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu seluruh data belanja hibah, belanja bantuan sosial, indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Sampel penelitian menggunakan 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur.

D. Definisi Operasional

1. Belanja Hibah (X_1) : Pada penelitian ini, indikator yang digunakan pada variabel belanja hibah adalah bantuan sanitasi rumah tangga dan bantuan sumber air minum layak.

2. Belanja Bantuan Sosial (X_2) : Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat agar lebih selektif, tidak mengikat dan dapat diupayakan untuk penetapan besarnya yang sesuai dengan keputusan presiden Nomer 80 tahun 2003. Dalam pemberian bantuan sosial harus didasarkan pada kriteria yang jelas, dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan mementingkan masyarakat luas. Belanja bantuan sosial, indikator yang digunakan adalah bantuan pangan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (Y) : IPM salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Dalam proses pembangunan manusia terdapat beberapa pokok, yaitu supaya manusia dapat merasakan kehidupan yang sehat dan berumur panjang, pendidikan, dan

¹⁶ Saiful Ghozi, Aris Sunindy, *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hal 6.

mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan dalam kehidupan yang lebih layak.

E. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek dalam pengamatan penelitian yang sering disebut juga sebagai faktor yang berperan dalam penelitian. Variabel adalah simbol atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi.¹⁷ Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Berikut ini variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Bebas (X_1) : Belanja Hibah
2. Variabel Bebas (X_2) : Belanja Bantuan Sosial
3. Variabel Terikat (Y) : Indeks Pembangunan Manusia

F. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk *time series* dan *cross section* yang rentan waktunya pada tahun 2016-2020. Sumber data dalam penelitian ini data publikasi resmi yang berasal dari lembaga pemerintah.

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015, hal 50.

¹⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015, hal 50.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia atau data sekunder. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh dari publikasi instansi.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian menggunakan teknik analisis data dengan model ekonometrika melalui bantuan *software* E-views 10 yang dalam pengelolaan analisis datanya dengan panel menggunakan salah satu metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, *Random Effect* yang ditentukan melalui Uji Chow, *Langrange Multipler*, dan Uji Hausman.

Teori regresi data panel adalah teori uji koefisien merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependent. Demikian pengaruh belanja hibah, belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan. Jika variabel bebas (X), maka variabel terikat (Y), apabila variabel X lebih dari satu maka disebut dengan regresi data panel. Model dalam penelitian ini menggunakan model regresi panel yang digunakan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

β_0 = Intersep

X_1 = Belanja Hibah

X_2 = Belanja Bantuan Sosial

β_1 = Koefisien regresi variabel belanja hibah

β_2 = Koefisien regresi variabel belanja bantuan sosial

e = Variabel gangguan atau kesalahan (*disturbance/error terms*)

i = Unit cross section Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

t = Unit time series tahun 2016-2020

Dalam menggunakan data panel memiliki keunggulan sendiri pada model regresi, salah satunya memperoleh data lebih banyak, memperoleh *degree of freedom* (df) lebih besar, serta bisa menghubungkan informasi data *time series* dan *cross section* sehingga dapat mengatasi persoalan apabila muncul seperti hilangnya variabel.

1. Pengujian Estimasi Model Dengan Data Panel

Beberapa pendekatan yang dipakai untuk estimasi model regresi dengan data panel yaitu :¹⁹

1. Common Effect

Untuk dapat mengestimasi *common effect* data panel melalui cara menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Pada teknik ini

¹⁹ Ansofino, “*Buku Ajar Ekonometrika*”, Yogyakarta : Deepublish, 2016, hlm 143.

memfokuskan pada pengukuran individu dan waktu. Asumsikan bahwa indeks pembangunan manusia antar variabel bebas pada waktu yang sama.

2. *Fixed Effect Model*

Model *fixed effect* mengestimasi data panel yang menggunakan variabel dummy untuk menemukan perbedaan intersep. *Fixed effect* memiliki perbedaan intersep variabel tempat namun tetap sama antar waktu, sehingga diasumsikan koefisien regresi (slope) tetap antar data tempat dan waktu. Untuk menggunakan FEM (*fixed effect model*) jika sudah melakukan uji chow signifikan sedangkan uji hausman tidak signifikan.

3. *Random Effect Model*

Pada model ini dimasukkan pada variabel dummy di dalam *fixed effect* memiliki tujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang yang sebenarnya. Akan tetapi, hal ini akan membawa koefisien berkurang pada derajat kebebasan yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Pada persoalan ini dapat ditanggulangi dengan memakai variabel gangguan (*error terms*) sebagai *random effect*.

2. Estimasi Model Dengan Data Panel

Apabila telah melakukan model seperti, langkah berikutnya yaitu dengan mendapatkan model yang cocok dalam menganalisis estimasi regresi data panel melalui Uji Chow, *Langrange Multiplier*, Uji Hausman.²⁰

²⁰ Ibid, hlm 144.

1. Uji Chow untuk pengujian yang dilakukan pada *common* dengan *fixed effect*. Pada uji chow menghitung nilai F di aplikasi melalui membandingkan nilai F kritis pada df, seseorang dapat memutuskan apakah menolak atau menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa varians di kedua subpopulasi yakni sama jika hipotesis nol tidak ditolak dapat menggunakan uji chow.

2. *Langrange Multiper (LM)* adalah pengujian yang dilakukan pada *common* dengan *random effect*. Pada uji ini untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari metode OLS digunakan uji LM.

3. Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* dengan *random effect*. Uji hausman pada pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk *cross-section random*. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih yaitu *random effect* model, tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *fixed effect* model.

3. Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpang dari dalam model regresi berganda yang digunakan. Sedangkan untuk teknik uji perhitungannya menggunakan Untuk itu perlu pengujian sebagai berikut :²¹

a. Uji Normalitas

²¹ Ansofino, *Buku Ajar Ekonometrika*, Yogyakarta : Deepublish, 2016, hal 20.

Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual di model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Sehingga dapat digunakan pada statistik parametrik melalui berpedoman pada mean, standar desiasi yang sama.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila ada korelasi divariabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yang ada dalam pembentukan model. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdeteksi korelasi antar variabel bebas, jika variabel bebas berkorelasi antar variabel lain maka variabel tersebut terganggu atau nilai korelasinya antar variabel bebas lainnya sama dengan nol.

4. Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini sebagai berikut :²²

a. Uji t

²² Muhammad Iqbal, *Pengolahan Data Dengan Regresi Linear Berganda*, 2015, <https://dosen.Perbanas.id> . diakses tanggal 23 Februari 2021.

Uji t bermaksud untuk menguji apakah parameter yang digunakan untuk mengestimasi model regresi yang sudah merupakan parameter yang tepat atau belum, maksud dari sudah tepat yaitu parameter tersebut telah mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1 maka bisa dikatakan semakin kuat model tersebut menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Secara umum wilayah Jawa Timur wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi. Secara astronomis terletak pada 111° , hingga $114,4^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,21^{\circ}$ hingga $8,48^{\circ}$ Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur secara geografis memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yakni mencapai $47.799,75 \text{ Km}^2$. Pada Provinsi Jawa terbagi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Batas wilayah Jawa Timur meliputi :

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali.
- c. Bagian Selatan berbatasan pada perairan terbuka yaitu Samudra Hindia.
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Provinsi Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Treggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kota

Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, Batu.

2. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Probolinggo	64.12%	64.28%	64.85%	65.60%	66.07%
Pasuruan	65.71%	66.69%	67.41%	68.29%	68.60%
Sidoarjo	78.17%	78.70%	79.50%	80.05%	80.29%
Mojokerto	71.38%	72.36%	72.64%	73.53%	73.83%
Sampang	59.09%	59.90%	61.00%	61.94%	62.70%
Pamekasan	63.98%	64.93%	65.41%	65.94%	66.26%
Sumenep	63.42%	64.28%	65.25%	66.22%	66.43%
Kota Kediri	76.33%	77.13%	77.58%	78.08%	78.23%
Kota Blitar	76.71%	77.10%	77.58%	78.56%	78.57%
Kota Malang	80.46%	80.65%	80.89%	81.32%	81.45%
Kota Probolinggo	71.50%	72.09%	72.53%	73.27%	73.27%
Kota Pasuruan	74.11%	74.39%	74.78%	75.25%	75.26%
Kota Mojokerto	76.38%	76.77%	77.14%	77.96%	78.04%

Sumber : Badan Pusat Statistik.go.id

Dapat dilihat tabel 4.1 diatas menggambarkan bahwa pada indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur, untuk Kabupaten Sidoarjo di tahun 2016 mencapai sebesar 78.17% mengalami peningkatan dibandingkan pada

Kabupaten lain. Sedangkan untuk Kota Malang pada tahun 2016 mencapai sebesar 80.05% dibandingkan Kota yang lain, sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 59.90% untuk Kabupaten Sampang.

3. Kondisi Belanja Hibah

Tabel 4.2 Belanja Hibah Berdasarkan Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2017-2018

Kab/Kota	2017	2018
Pacitan	32.213.471.500 (Miliar)	44.801.282.900.00 (Miliar)
Ponorogo	33.900.000.00 (Miliar)	50.650.000.00 (Miliar)
Trenggalek	778.467.325.661 (Miliar)	794.003.816.55 (Miliar)
Tulungagung	60.840.000.00 (Miliar)	122.230.000.000 (Miliar)
Kota Kediri	33.690.000.00 (Miliar)	48.260.000.00 (Miliar)
Kota Blitar	10.750.000.00 (Miliar)	16.090.000.00 (Miliar)
Kota Malang	72.90.000.000 (Miliar)	86.160.000.00 (Miliar)
Kota Probolinggo	37.950.000.00 (Miliar)	35.09.000.000 (Miliar)

Sumber :Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.go.id

Pada tabel 4.2 diatas bahwa belanja hibah pada tahun 2017 di Kabupaten Trenggalek mencapai sebesar 778.467.325.661 Miliar mengalami peningkatan dibandingkan Kabupaten lainnya. Kabupaten Ponorogo sebesar 33.900.000.00 Miliar tahun 2017, sedangkan tahun 2018 belanja hibah di Kabupaten Pacitan sebesar 44.801.282.900 Miliar. Belanja Hibah di Kota Kediri tahun 2017 sebesar 33.690.000.00 Miliar, pada Kota Malang tahun 2018 mencapai sebesar 86.160.000.00 Miliar.

4. Kondisi Belanja Bantuan Sosial

Tabel 4.3 Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2017-2018

Kab/Kota	2017	2018
Pacitan	14.148.845.416 Miliar	9.721.472.000 Miliar
Ponorogo	16.410.000.00 Miliar	15.410.000.00 Miliar
Trenggalek	26.317.710.000 Miliar	30.691.720.000 Miliar
Tulungagung	6.390.000.00 Miliar	8.770.000.000 Miliar
Kota Kediri	32.05.000.000 Miliar	63.54.000.000 Miliar
Kota Blitar	3.120.000.00 Miliar	5.980.000.000 Miliar
Kota Malang	50.000.000.000,00 Miliar	50.000.000.000,00 Miliar
Kota Probolinggo	2.80.000.000 Miliar	2.80.000.000 Miliar

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan .go.id

Pada tabel diatas bahwa belanja bantuan sosial di tahun 2017 untuk Kabupaten Pacitan sebesar 14.148.845.416 Miliar, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 26.317.710.000 Miliar mengalami peningkatan, untuk Kabupaten Pacitan sebesar 9.721.472.000 Miliar tahun 2018. Untuk belanja bantuan sosial Kota Blitar mencapai sebesar 3.120.000.00 Miliar tahun 2017, Kota Probolinggo sebesar 2.80.000.000 Miliar tahun 2018. Pada Kota Blitar belanja bantuan sosial mengalami peningkatan dibandingkan Kota Probolinggo.

B. Analisis Data

1. Estimasi Regresi Dengan Data Panel

Dalam penelitian ini, pengolahan pada analisis data menggunakan metode analisis regresi panel dengan menggunakan metode *Least Square* yang menjelaskan asumsi yang bersifat statistik sehingga dapat dijadikan metode yang

unggul dalam analisis regresi data yang telah diperoleh. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam estimasi model regresi dengan data panel yaitu model uji *Common Effect*, uji *Fixed Effect*, uji *Random Effect* maka nantinya akan terpilih salah satu model yang terbaik yang digunakan dalam menganalisis pengaruh pada setiap variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut merupakan hasil pada setiap uji dari regresi data panel.

A. Uji *Common Effect*

Tabel 4.4 Hasil Uji *Common Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.223177	0.047383	89.12847	0.0000
BELANJA HIBAH	0.001788	0.001210	1.478215	0.1410
BELANJA BANTUAN SOSIAL	-2.93E-05	0.002059	-0.014252	0.9886
R-squared	0.011550	Mean dependent var	4.259102	
Adjusted R-squared	0.000979	S.D. dependent var	0.073075	
S.E. of regression	0.073039	Akaike info criterion	-2.379978	
Sum squared resid	0.997593	Schwarz criterion	-2.328709	
Log likelihood	229.0979	Hannan-Quinn criter.	-2.359209	
F-statistic	1.092568	Durbin-Watson stat	0.856034	
Prob(F-statistic)	0.337485			

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Model ini adalah teknik penggabungan data panel pada OLS yang biasa disebut estimasi *Common Effect*. Pada teknik ini memfokuskan pada pengukuran individu dan waktu. Diperkirakan laju indeks pembangunan manusia dan variabel bebas pada waktu yang sama.

B. *Fixed Effect Model*

Tabel 4.5 Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.263367	0.048416	88.05670	0.0000
BELANJA HIBAH	0.000118	0.001109	0.106431	0.9154

BELANJA BANTUN SOSIAL	-0.000341	0.002098	-0.162672	0.8710
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.462694	Mean dependent var	4.259102	
Adjusted R-squared	0.322994	S.D. dependent var	0.073075	
S.E. of regression	0.060126	Akaike info criterion	-2.600074	
Sum squared resid	0.542276	Schwarz criterion	-1.916490	
Log likelihood	287.0070	Hannan-Quinn criter.	-2.323164	
F-statistic	3.312062	Durbin-Watson stat	1.535531	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Teknik *Fixed Effect* yaitu model yang memakai variabel dummy untuk menemukan adanya perbedaan intersep. Pada penjelasan *Fixed Effect* terdapat suatu perbedaan intersep variabel tempat namun intersepnya sama intersepnya antar waktu (*Time Intervarian*). Dalam teknik ini diasumsikan koefisien regresi (slope) tetap antar data tempat dan antar waktu.

C. Random Effect Model

Tabel 4.6 Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.247712	0.045278	93.81493	0.0000
BELANJA HIBAH	0.000715	0.001070	0.668137	0.5049
BELANJA BANTUAN SOSIAL	-0.000163	0.001944	-0.084088	0.9331
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.040319	0.3102
Idiosyncratic random			0.060126	0.6898
Weighted Statistics				
R-squared	0.002417	Mean dependent var	2.363119	
Adjusted R-squared	-0.008252	S.D. dependent var	0.060252	
S.E. of regression	0.060500	Sum squared resid	0.684476	
F-statistic	0.226561	Durbin-Watson stat	1.221137	
Prob(F-statistic)	0.797489			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.007360	Mean dependent var	4.259102	
Sum squared resid	1.001822	Durbin-Watson stat	0.834318	

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Dalam teknik *random effect* yang dimasukan pada variabel dummy didalam *fixed effect* yang bertujuan untuk mencari tahu mengenai yang belum dapat diketahui. Akan tetapi, memperoleh koefisien berkurang pada derajat kebebasan yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Persoalan ini dapat ditanggulangi menggunakan variabel gangguan sebagai metode *random effect*.

Dari hasil uji chow dan uji hausman maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect* model. Dijelaskan melalui persamaan penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 4.247712 + 0.00715 (X1) + -0.000163 (X2)$$

Dimana :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X1 = Belanja Hibah

X2 = Belanja Bantuan Sosial

2. Pemilihan Estimasi Analisis Data Panel

A. Uji Chow

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.403944	(37,150)	0.0000
Cross-section Chi-square	115.818238	37	0.0000

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabily dari *Cross-section Chi-square* sebesar $0.0000 < 0.05$. Dengan asumsi uji *fixed effect* model (FEM)

signifikan, dapat disimpulkan estimasi yang paling tepat yaitu menggunakan *fixed effect* model untuk itu perlu melakukan uji hausman.

B. Uji Hausman Test

Tabel 4.8 Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.112355	2	0.3478

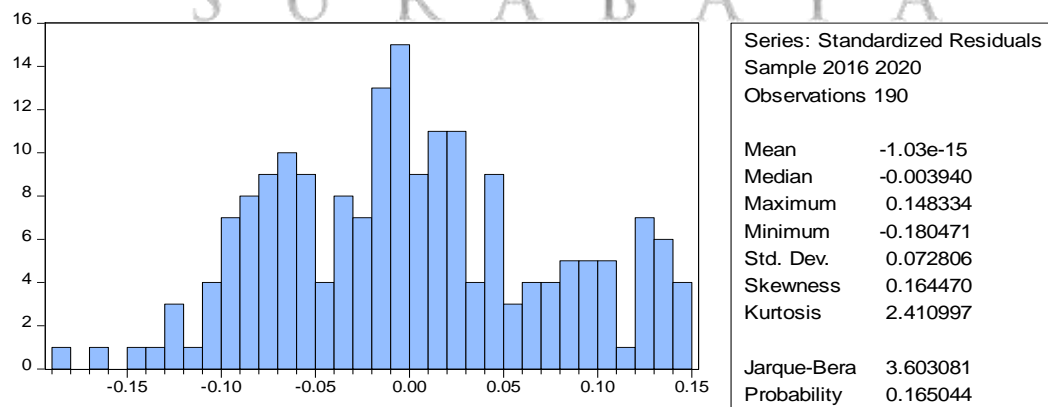
Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probability dari *Cross-section random* sebesar $0.3478 > 0,05$ sehingga signifikan, maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect* model (REM) untuk itu tanpa perlu melakukan uji LM.

3. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Tabel 4.9 Uji Normalitas Residual



Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Dari tabel 4.9 diatas bahwa pada uji normalitas residual diketahui bahwa probability dari nilai jarque-bera sebesar $0.165044 > 0.05$ maka diperoleh hipotesis diterima, maka dapat disimpulkan bahwa data panel berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas

	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.002245	79.96269	NA
Belanja Hibah	1.46E-06	22.71363	1.000048
Belanja Bantuan Sosial	4.24E-06	58.73750	1.000048

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews10

Setelah melakukan uji asumsi multikolonieritas dengan melihat nilai dari Variance Factor (VIF) pada coefficient diagnostics dilihat dari nilai VIF seluruh variabel bebas lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model analisis.

C. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	1.158033	Prob. F(2,187)	0.3163
Obs*R-squared	2.324433	Prob. Chi-Square(2)	0.3128
Scaled explained SS	2.209452	Prob. Chi-Square(2)	0.3313

Sumber :Data diolah menggunakan Eviews 10

Dari hasil uji heteroskedastisitas tabel 4.11 diatas diketahui bahwa nilai probability yang ditunjukkan Prob. Chi-Square (2) pada tabel diatas sebesar

0.3128 > 0.01 (tingkat signifikansi). Maka diperoleh hipotesis menerima yang berarti tidak terdapat masalah asumsi heteroskedastisitas pada model analisis.

4. Uji Statistik

A. Uji t

Pada penggunaan uji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk melihat pengaruh pada variabel bebas yaitu melihat statistik t disetiap variabel bebas. Dikatakan signifikan apabila nilai Prob < 0.05 maka dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Prob > 0.05 maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.247712	0.045278	93.81493	0.0000
BELANJA HIBAH	0.000715	0.001070	0.668137	0.5049
BELANJA BANTUAN SOSIAL	-0.000163	0.001944	-0.084088	0.9331
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.040319	0.3102
Idiosyncratic random			0.060126	0.6898
Weighted Statistics				
R-squared	0.002417	Mean dependent var	2.363119	
Adjusted R-squared	-0.008252	S.D. dependent var	0.060252	
S.E. of regression	0.060500	Sum squared resid	0.684476	
F-statistic	0.226561	Durbin-Watson stat	1.221137	
Prob(F-statistic)	0.797489			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.007360	Mean dependent var	4.259102	
Sum squared resid	1.001822	Durbin-Watson stat	0.834318	

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Dalam penelitian ini memakai *random effect* model (REM), penelitian yang telah yang telah disusun, sebagai berikut :

1. Nilai Prob variabel belanja hibah (X1) terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0.5049, dan nilai t-Statistik sebesar 0.668137 dengan koefisien bertanda positif. Karena nilai Prob yang diperoleh > 0.05 yang berarti tidak signifikan terhadap variabel. Sehingga disimpulkan bahwa variabel belanja hibah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Nilai Prob variabel belanja bantuan sosial (X2) terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan sebesar 0.9331, dan nilai t-Statistik sebesar -0.084088 dengan koefisien negatif. Karena nilai Prob yang diperoleh > 0.05 yang berarti tidak signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

B. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.002417	Mean dependent var	2.363119
Adjusted R-squared	-0.008252	S.D. dependent var	0.060252
S.E. of regression	0.060500	Sum squared resid	0.684476
F-statistic	0.226561	Durbin-Watson stat	1.221137
Prob(F-statistic)	0.797489		

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10

Pada tabel 4.13 diatas hasil uji R^2 diperoleh nilai sebesar 0.002417, hal menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap variabel terikat (indeks pembangunan manusia) sebesar 0,24% sedangkan sisa variabel lainnya tidak dimasukkan dalam model estimasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Setelah dilakukan tahapan uji analisis uji *common effect*, uji *fixed effect* model, uji *random effect*, uji chow, uji hausman maka model analisis terbaik yang digunakan penelitian ini *random effect* model diperoleh persamaan yang menjelaskan pengaruh belanja hibah, belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia. Berikut persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = 4.247712 + 0.00715 (X1) + -0.000163 (X2)$$

Berdasarkan dari persamaan regresi data panel diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien sebesar 4.247712 berarti belanja hibah (X1), belanja bantuan sosial (X2) sama dengan nol maka indeks pembangunan manusia (Y) 4.247712.
- b. Nilai koefisien X1 sebesar 0.00715. Artinya setiap peningkatan pada pada belanja hibah sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0.00715% dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara belanja hibah dan indeks pembangunan manusia.

c. Nilai koefisien sebesar -0.000163 (X^2). Artinya jika kondisi pada belanja bantuan meningkat atau tidak terjadi masalah maka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia.

1. Pengaruh Belanja Hibah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Parsial

Berdasarkan pada data yang telah diuji dan analisis data menggunakan bantuan aplikasi pengolah data Eviews 10, maka pembahasan mengenai pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, variabel belanja hibah (X_1) terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai statistik T sebesar 0.668137 dengan koefisien bertanda positif serta nilai Prob. sebesar 0.5049 yakni nilai prob > 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur masih menitikberatkan alokasi anggaran pada sektor lain terutama terkait pemenuhan standar layanan bagi masyarakat serta pengalokasian yang masih belum diarahkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti kemudahan akses untuk pendanaan bagi usaha kecil.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK/05/2011 bahwa belanja hibah adalah pengeluaran pusat dalam bentuk uang, barang yang diberikan kepada daerah secara tidak terus menerus. Selain itu hasil penelitian ini didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Willman Fogati Zebua dan Noval Adib (2014) menyatakan bahwa variabel belanja hibah berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal itu karena pemerintah masih menitikberatkan alokasi anggaran pada sektor lain serta anggaran belanja hibah yang diberikan terlalu kecil sehingga tidak mampu memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan untuk masyarakat.

Pada pembangunan kesejahteraan sosial salah satu usaha pemerintah yang terencana, melembaga meliputi memberikan pelayanan sosial untuk kebutuhan masyarakat, mengatasi serta mencegah masalah sosial, memperkuat lembaga yang bergerak pada masalah sosial. Dalam kesejahteraan bukan hanya menunjukkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, tetapi benar-benar bahwa semua kegiatan yang difokuskan mensejahterakan seluruh masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan bantuan hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berupa bantuan hibah kepada masyarakat seperti bantuan sanitasi rumah, bantuan air minum layak, dan sebagainya agar masyarakat dapat mendapatkan kelayakan hidup serta bisa mendapatkan kesehatan yang merata.

Namun pada kenyataannya pengalokasian belanja hibah belum secara merata pada daerah-daerah plosok desa yang jaraknya jauh.

Hal ini tidak sesuai pada teori Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah kepada pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah sesuai kepentingan daerah untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Pane (2011), belanja hibah diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk hubungan pemerintah daerah antara masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.²³

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah merupakan pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, secara spesifik telah ditetapkan, bersifat

²³ Deswanto, B.A, Ismail .A, Hendarmin, “*Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015*”, 2017, hlm 196.

tidak wajib, tidak terus menerus, tidak mengikat bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²⁴

2. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Secara Parsial

Dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, variabel belanja bantuan sosial (X2) terhadap indeks pembangunan manusia diwilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa nilai statistik T sebesar -0.084088 dengan koefisien bertanda negatif serta nilai Prob. sebesar 0.9331 yakni nilai prob > 0.05. Sehingga disimpulkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini tidak sesuai pada teori peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK/05/2015 yang mengatur bahwa belanja bantuan sosial merupakan belanja anggaran yang pemberian bantuannya dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang atau barang untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya belanja bantuan sosial memiliki porsi kecil di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan peran belanja yang masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta

²⁴ Saparudin, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014", (Skripsi Universitas Terbuka Jakarta, 2016), hlm 58.

alokasi anggaran yang masih belum membantu masyarakat miskin seperti melalui memperdayakan masyarakat, memberikan modal usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuwani (2011) menyatakan bahwa belanja bantuan sosial salah satu belanja yang akan meningkat menjelang pemilihan kepala daerah.²⁵ Pada pemberian alokasi anggarannya jika dialokasikan secara langsung kepada masyarakat membuat adanya resiko penyalahgunaan belanja bantuan sosial sehingga tidak efektif untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Hal ini untuk mengalokasikan belanja bantuan sosial harus bisa berdampak berjangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat tidak hanya berpengaruh pada jangka pendek. Manfaat yang ingin dicapai dalam belanja bantuan sosial telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK/05/2012, berikut tujuan dari belanja bantuan sosial :²⁷

- a. Rehabilitas sosial untuk membantu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar bisa melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- b. Pelindungan sosial untuk mencegah dan mengatasi resiko dari terjadinya kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok agar kelangsungan hidupnya terpenuhi sesuai kebutuhan dasarnya.

²⁵ Ibid, hlm 15.

²⁶ Willman F.Z, Noval, Adib, “*Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013)*”, 2014, 15.

²⁷ Praptiningsih, Dwi S.F, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2014*”, 2017, 3.

- c. Jaminan sosial yaitu untuk menjamin seluruh masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
- d. Mengatasi kemiskinan yaitu suatu kebijakan, program yang dilakukan pemerintah terhadap seseorang, keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan agar memiliki kehidupan yang layak.
- e. Mencegah dan mengatasi bencana alam yaitu upaya untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana.

Buletin Teknis Nomor 10 tentang akuntansi belanja bantuan sosial tahun 2011 mendefinisikan bahwa belanja bantuan sosial berupa transfer uang atau barang yang diberikan oleh pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi dari terjadi resiko ketimpangan kesejahteraan pada masyarakat lainnya. Adanya bantuan yang diberikan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, memiliki kehidupan yang layak dari segi kesehatan, pendidikan, serta berdampak pada akses prasarana dan sarana bagi seluruh masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat mengurangi ketimpangan antar masyarakat, jika ketimpangan masyarakat dari segi ekonomi, sosial dapat berkurang maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan yang terjadi pada setiap daerah dengan adanya masalah kemiskinan, ketimpangan sosial akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan manusia.

Meskipun hasil regresi data pada penelitian tidak signifikan, namun belanja bantuan sosial memiliki manfaat terhadap indeks pembangunan manusia.

Belanja bantuan sosial diberikan untuk melindungi kemungkinan dari resiko seperti kejadian yang menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial akibat dampak krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam jika tidak diberikan bantuan maka akan semakin terpuruk.²⁸ Fungsi dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat melalui menganggarkan belanja daerah dalam bentuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada pelaksanaannya telah diatur perundangan-undangan dan peraturan kepala daerah.

Pada pengalokasian belanja bantuan sosial untuk kesejahteraan melalui bantuan pangan yang diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan daerah serta mengurangi sedikit beban hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia salah satu indikator untuk terciptanya pembangunan yang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi.

Pada tingkat pembangunan manusia yang mengalami peningkatan akan menentukan kemampuan penduduk untuk menyerap dan mengelola sumber daya yang ada. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu daerah. Dalam suatu daerah dikatakan maju bukan saja dihitung dengan pendapatan domestik bruto tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakat. *United Nations Development Program (UNDP)* telah

²⁸ Ibid, 15

menyusun indikator kesejahteraan manusia melalui meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan, kehidupan yang layak.

Untuk mewujudkan indeks pembangunan manusia yang maksimal di negara atau daerah khususnya Provinsi Jawa Timur yaitu alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah serta pengalokasian anggarannya diarahkan untuk sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah yaitu mengembangkan kemampuan manusianya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera. Akan tetapi bagaimana pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat bermanfaat secara merata, serta secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan mengenai belanja hibah, belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020, demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel belanja hibah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
2. Secara parsial variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur 2016-2020.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya apabila melakukan penelitian dengan variabel yang sama diharapkan untuk mengembangkan, meningkatkan penulisan menjadi lebih baik serta dapat menambah variabel lain yang berkaitan.
2. Untuk Provinsi Jawa Timur dengan adanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial tidak berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mengoptimalkan alokasi anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial untuk dapat berpengaruh secara tidak langsung kepada semua masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putu, A. A. 2012 . "*Metodologi Penelitian Bisnis*". Malang : UB Press.
- Anggraini, Yusniah. 2018. "*Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*". Jakarta : Indocamp.
- Ansofino. 2016 . "Buku Ajar Ekonometrika". Yogyakarta : Deepublish.
- BpsJatim.go.id (Diakses Pada Tanggal 23 September 2021).
- Cholis, N. H. 2007. "*Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*". Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Deswanto, B.D., Ismail, A., Hendarmin. 2017, "*Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*" Tahun 2010-2015. Vol 6, No 3, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan.
- Djpk.Kemenkeu.go.id (Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2022).
- Ghozi, Saiful., Sunindy, A. 2015. "*Statistik Deskripsi Untuk Ekonomi*". Yogyakarta : Deepublish.
- Harefa, Mandala, Permana, H. S., dkk. 2017. "*Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*". Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khusaini, Moch. 2018 . "*Keuangan Daerah*". Malang : UB Press.
- Mahi, Kabul, A., Trigunarso, Indra, S. 2017. "*Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*". Jakarta : Prenadamedia Group.
- Pangestu, Wulan. 2016 . "*Analisis Politisasi APBD Dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Jawa Timur*". Skripsi Ekonomi Universitas Jember.
- Prabowo, Dwi, E. 2016. "*Pengaruh Faktor Politik Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia TA 2015*". Vol 16, No 2, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.
- Priambodo, Anugrah. 2015 . "*Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013)*". Skripsi Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

- Rahmawati, I. N. 2010 . "Pengaruh Pendekatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah". Skripsi Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sasana, Hadi. 2012, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) ". Vol 25, No 1, Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen.
- Sayekti, Adji , R. M. 2018. "Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah". Klaten : Cempaka Putih.
- Sendouw, Agustien, dkk. 2017," Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado", Vol 18, No 5, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah.
- Sodik, A. M., Siyoto, S. 2015."Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Suwanda, Dadang, Junjuran, A. B., dkk. 2019, "Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik ", Bandung : PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Wulandari, A. P., Iryanie, Emy. 2018, "Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", Yogyakarta : Deepublish.
- Zebua, F. W., Adib, Noval. 2014, "Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia", Vol 3, No 1.